

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Lempeng Benua Asia, Lempeng Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia memiliki potensi yang tinggi dan rawan akan terjadinya bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, Indonesia juga terletak di sepanjang garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Wilayah tropis menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Dilansir dari *NASA Global Precipitation Measurement*, daerah khatulistiwa (tropis) menerima sebagian besar energi matahari yang menyebabkan lebih banyak penguapan. Hal ini yang menjadi alasan Wilayah Indonesia menghasilkan lebih banyak curah hujan. Curah hujan yang tinggi membuat Indonesia rentan akan bencana banjir dan juga longsor (Silmi Nurul Utami).

World Risk Report (WRR) menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan resiko bencana alam tertinggi di dunia, sebagian besar disebabkan oleh kebakaran hutan dan bencana banjir. Pada tahun 2023, menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia sebanyak 5.400 kejadian. Kejadian bencana alam ini, sebagian banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 844 kejadian dan Provinsi Jawa Tengah dengan 629 kejadian bencana alam (DIBI BNPB, 2023).

Setiap musim hujan, bencana banjir pasti melanda beberapa daerah di Indonesia. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2023, bencana banjir melanda beberapa daerah di Indonesia sebanyak 1.255 kali. Bencana banjir ini mengakibatkan kerugian material dan non material. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BPNB), kerugian material dari bencana banjir pada tahun 2023 adalah 6,494 unit kerusakan rumah, 9 unit kerusakan fasilitas pendidikan, 4 unit kerusakan fasilitas kesehatan, 23 unit kerusakan tempat peribadatan, dan 26 unit kerusakan fasilitas umum. Jumlah keseluruhan kerugian material yang disebabkan banjir di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 6,556 unit. Selain kerugian material, bencana banjir di Indonesia pada tahun 2023 juga berdampak pada kerugian non material. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BPNB), kerugian non material dari bencana banjir pada tahun 2023 adalah 19 jiwa meninggal dunia, 2 jiwa hilang, 8 jiwa luka luka, 55,289 jiwa menderita dan 3,379 jiwa mengungsi. Dari data tersebut, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 59,237 jiwa yang terdampak akibat bencana banjir di Indonesia. Masyarakat yang menjadi subyek dari bencana itu sendiri harus bisa lebih mandiri untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam merespon kejadian bencana. Karena kerugian akibat bencana sangat tergantung pada kesiapsiagaan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.

Upaya yang bisa dilakukan dalam penanggulangan bencana ini, yaitu melalui kesiapsiagaan masyarakat. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) terdapat lima (5) aspek kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Aspek yang pertama, yaitu pengetahuan tentang bencana dan sikap menghadapi risiko bencana tersebut. Masyarakat yang paham dan mengetahui bencana akan lebih bijak mengambil sikap akan risiko yang dihadapi. Aspek yang kedua adalah kebijakan, pemerintah dalam hal ini harus memiliki kebijakan tentang kesiapsiagaan bencana. Aspek ketiga adalah rencana tanggap darurat, masyarakat yang mengetahui risiko bencana akan melakukan tanggap darurat jika terjadi bencana. Aspek keempat adalah sistem peringatan dini, sistem peringatan dini adalah kegiatan peringatan kepada masyarakat jika akan terjadi bencana. Aspek yang kelima adalah kemampuan memobilisasi sumber daya, memobilisasi sumber daya yaitu kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan tepat jika terjadi bencana. Dalam hal ini, upaya kesiapsiagaan harus dilaksanakan bersama dan bersinergitas antara masyarakat dengan pemerintah (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Salah satu upaya pemerintah dalam kesiapsiagaan terjadinya bencana adalah membentuk dan mengukuhkan daerah yang rawan bencana melalui program dari Kementerian Sosial yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB). Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (KSB), Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat

dalam penanggulangan bencana yaitu melalui upaya mempersiapkan masyarakat agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman dan resiko di wilayah sesuai potensi local melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian. Prinsip utama pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah mengutamakan kemandirian masyarakat. Namun demikian, dukungan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penanggulangan seperti pemerintah dan pihak swasta masih tetap dibutuhkan (Petunjuk Teknis Program Kampung Siaga Bencana, 2011).

Salah satu kabupaten yang telah mengukuhkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah yang rawan bencana adalah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati sendiri merupakan daerah yang rawan bencana terutama bencana banjir. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) menyatakan bahwa Kabupaten Pati menduduki peringkat ke dua (2) sebagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi bencana sejak tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari intensitas bencana banjir yang melanda Kabupaten Pati setiap tahunnya. Saat musim penghujan tiba, beberapa daerah di Kabupaten Pati selalu terendam banjir khususnya di daerah sekitar Sungai Juwana/ Sungai Silugonggo. Sungai Juwana sendiri adalah sungai terbesar di Kabupaten Pati.

Salah satu desa yang mempunyai potensi tinggi terjadi banjir setiap tahunnya adalah Desa Ngastorejo. Desa Ngastorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati merupakan daerah yang rawan terjadi bencana banjir, bahkan setiap tahun pasti terjadi bencana banjir terutama saat musim penghujan. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Ngastorejo merupakan daerah yang berada di seberang Sungai Juwana/Sungai

Silugonggo. Pada tahun 2023 tepatnya bulan Januari hingga bulan Maret, Desa Ngastorejo mengalami bencana banjir hingga mencapai dua (2) meter. Hal ini berlangsung selama 3 bulan membanjiri Desa Ngastorejo. Dilansir dari Radar Kudus total rumah yang terendam sekitar 258 unit dan rumah yang terdampak sebanyak 353, terdiri dari 2 RW dan 8 RT. Sedangkan Jumlah warga yang terdampak sebanyak 757 jiwa (Ali Mustofa, 2023).

Dinas Sosial Kabupaten Pati bersama dengan arahan dari Kementerian Sosial membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) pada tanggal 17 Oktober 2023 di Desa Ngastorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Desa Ngastorejo dikukuhkan sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) bernama “Ngasto Sigab”. Dilansir dari Suara Merdeka, pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Tangguh Jaya di Desa Ngastorejo merupakan program KSB pertama di Kabupaten Pati. Dalam pembentukannya dilaksanakan selama 3 hari yang dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, Dinsos Pati dan Anggota DPR RI Komisi VIII. Kepala Pelaksana Tugas Harian (Kalakhar) Martinus Budi Prasetya menyebut bahwa “Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan menjadi salah satu desa terdampak banjir di Kabupaten Pati. Desa ini bahkan menjadi desa terendam banjir terlama” (Abdul Aziz Afifi, 2023).

Tujuan dibentuknya KSB di Desa Ngastorejo adalah sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir karena Desa Ngastorejo merupakan daerah yang rawan dan berpotensi banjir setiap tahunnya. Selain itu, sesuai dengan Permensos Nomor 128 Tahun 2011, tujuan dibentuknya KSB yaitu : (1) memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya

dan risiko bencana; (2) membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat; (3) mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana; (4) menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan dan; (5) mengoptimalkan potensi serta sumber daya untuk penanggulangan bencana. Di Desa Ngastorejo, pengetahuan masyarakat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir masih minim. Hal ini terbukti saat banjir tahun 2021 dan 2023 di Desa Ngastorejo, masyarakat Desa Ngastorejo masih kurang paham akan risiko bencana banjir. Sebagian dari masyarakat ada yang masih tinggal dirumah dan tidak mau ikut mengungsi. Bahkan, ada beberapa yang tinggal di rumah pohon sebagai tempat perlindungan diri nya. Dilansir dari Muria News, Kepala Pelaksana Tugas Harian (Kalakhar) Martinus Budi Prasetya saat pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Ngastorejo mengatakan “Melalui latihan ini, warga desa sudah tahu harus melakukan apa dan kemana. Jangan sampai seperti tahun kemarin ada warga yang menunggu banjir surut dirumah dan juga ada yang membuat rumah pohon” (Umar Hanafi, 2023).

Kampung Siaga Bencana (KSB) Ngasto Sigab di Desa Ngastorejo mempunyai peran penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Meskipun begitu, pada dasarnya kegiatan KSB lebih menekankan pada pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana karena dengan kesiapsiagaan, masyarakat dapat merencanakan sesuatu untuk mengurangi resiko bencana. Ini mencerminkan pendekatan holistik yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam upaya kesiapsiagaan bencana, keterlibatan aktif dari masyarakat lokal sangat penting. Keterlibatan aktif dari masyarakat lokal sangat penting karena masyarakat adalah komponen terdepan dalam menghadapi ancaman bencana dan kerugian akibat bencana sangat tergantung pada kesiapsiagaan, pengetahuan, serta keterampilan masyarakat. Oleh karena itu, membangun kesiapsiagaan bencana yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai motor penggerak utamanya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh V.L Sinta Herindrasti, dkk (2022) mengenai Inisiatif Lokal dalam Pengembangan Pariwisata dan Perlindungan Kelestarian Hutan Kalibiru Kalurahan Harhowikis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo DIY sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan perlindungan kelestarian Hutan Kalibiru. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam menjaga kelestarian Hutan Kalibiru agar tetap terjaga dengan baik dan meminimalisir terjadinya bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor. Selain itu juga, penelitian ini menjelaskan terkait inisiatif dari masyarakat lokal mengembangkan Hutan Kalibiru dengan menjadikan Hutan Kalibiru ini sebagai objek pariwisata. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Proses inisiatif lokal yang terjadi bermula dari kelompok kecil yang menginisiasi masyarakat, hal ini dapat berhasil karena adanya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dan perlindungan Hutan Kalibiru (V.L Sinta Herindrasti, 2022).

Penelitian diatas menunjukkan pentingnya inisiatif lokal dalam suatu upaya pengembangan masyarakat. Penelitian tersebut menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh V.L Sinta Herindrasti, dkk (2022) dengan penelitian ini adalah topik dari penelitiannya. . Penelitian ini berfokus pada inisiatif lokal kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Ngastorejo.

Menurut John P. Kretzman dan John L. McKnight (1993) : Dalam bukunya "*Building Communities From The Inside Out : A Path Toward Finding And Mobilizing A Community's Assets*", inisiatif lokal merupakan upaya yang melibatkan individu, kelompok, dan organisasi didalam suatu komunitas untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi, menggerakkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kondisi dan memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui teori ini, ketika diterapkan pada kesiapsiagaan bencana banjir di Desa Ngastorejo, inisiatif lokal mencerminkan kerja sama antara berbagai pihak di tingkat desa untuk mengembangkan strategi dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan demikian, inisiatif lokal menjadi faktor penting dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana banjir, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di tingkat lokal.

Masyarakat lokal Desa Ngastorejo sebenarnya sudah melakukan inisiatif dalam kesiapsiagaan bencana banjir. Hal ini terlihat dari terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Ngastorejo. Masyarakat lokal mengidentifikasi resiko bencana banjir yang setiap tahun melanda Desa Ngastorejo. Sehingga mereka berinisiatif untuk mengajukan Desa Ngastorejo menjadi Kampung Siaga

Bencana karena rawan terjadi bencana yang dikukuhkan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun setelah dibentuknya KSB di Desa Ngastorejo, terdapat permasalahan inisiatif lokal dalam kesiapsiagaan bencana banjir. Hal ini dapat terlihat dari kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia sebagai upaya kesiapsiagaan bencana banjir. Contoh dari permasalahan ini yaitu salah satu informasi yang peneliti peroleh dari wawancara informal dengan salah satu warga di Desa Ngastorejo. Peneliti mendapatkan informasi bahwa di Desa Ngastorejo bahwa terdapat permasalahan terkait kesiapsiagaan bencana banjir yaitu belum adanya sistem peringatan dini baik modern ataupun tingkat lokal. Peringatan dini sendiri dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara modern dan secara lokal. Peringatan dini secara modern menggunakan alat pendeteksi bencana, sedangkan peringatan dini lokal memanfaatkan swadaya masyarakat sebagai pendeteksi manual. Sebagai contoh, sistem peringatan dini lokal yang diterapkan di Desa Undaan Kabupaten Kudus. Dalam sistem ini, masyarakat secara bergantian menjaga dan mengamati debit air sungai pada malam hari. Ketika air sungai meluap, masyarakat akan memberikan tanda peringatan dengan memukul kentongan sebagai sinyal untuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana banjir. Namun, Desa Ngastorejo yang rawan bencana banjir karena berseberangan dengan Sungai Juwana belum membentuk sistem peringatan dini lokal seperti ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang inisiatif lokal kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih detail inisiatif lokal kesiapsiagaan bencana banjir dengan menggunakan teori dari

John P.Kretzman dan John L.McKnight (1993) yaitu dalam mengidentifikasi, menggerakkan dan mengoptimalkan sumber daya. Peneliti juga menggunakan tiga dari lima aspek kesiapsiagaan dari LIPI-UNESCO/ISDR, 2006. Aspek yang digunakan yaitu aspek pengetahuan dan sikap, aspek sistem peringatan dini, dan aspek rencana tanggap darurat. Peneliti hanya menggunakan tiga aspek karena tiga aspek tersebut paling relevan untuk dihubungkan dengan teori inisiatif lokal menurut John P.Kretzman dan John L.McKnight (1993).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah “Bagaimana inisiatif lokal dalam kesiapsiagaan bencana banjir melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Ngastorejo”. Perumusan masalah tersebut diuraikan dalam beberapa sub sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan sikap masyarakat lokal dalam mengidentifikasi resiko bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo?
2. Bagaimana upaya menggerakkan masyarakat dalam rencana tanggap darurat bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo?
3. Bagaimana upaya mengoptimalkan sumber daya dalam sistem peringatan dini di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai inisiatif lokal kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo. Dalam penelitian ini, tujuan berdasarkan rumusan masalah diperinci sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan terkait pengetahuan dan sikap masyarakat dalam mengidentifikasi resiko bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo
2. Mengetahui dan menjelaskan upaya menggerakkan masyarakat dalam rencana tanggap darurat bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo
3. Mengetahui dan menjelaskan upaya mengoptimalkan sumber daya dalam sistem peringatan dini di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru untuk memperkaya penjelasan ilmiah maupun praktik pekerjaan sosial di bidang kebencanaan mengenai inisiatif lokal kesiapsiagaan bencana banjir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai upaya pemecahan masalah dari inisiatif lokal kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Siaga Bencana Desa Ngastorejo.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian mengenai inisiatif lokal dalam kesiapsiagaan bencana banjir melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Ngastorejo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan
- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, Langkah-langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan
- BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pihak terkait